

**PENGARUH JUMLAH HOTEL, JUMLAH WISATAWAN,
PENDAPATAN PERKAPITA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI JAWA TIMUR TAHUN
2012-2016**

SKRIPSI



disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Jurusan Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Evi Yunimiartiningsih
Nomor Mahasiswa : 13313089
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA
2017**

**PENGARUH JUMLAH HOTEL, JUMLAH WISATAWAN,
PENDAPATAN PERKAPITA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI JAWA TIMUR TAHUN
2012-2016**

SKRIPSI

ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar sarjana Strata-1 di Program Studi Ilmu EKonomi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Ditulis oleh:

Nama : Evi Yunimiartiningsih
Nomor Mahasiswa : 13313089
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2017

Penulis.



Evi Yunimiartiningtin

PENGESAHAN

PENGARUH JUMLAH HOTEL, JUMLAH WISATAWAN, PENDAPATAN PERKAPITA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2016

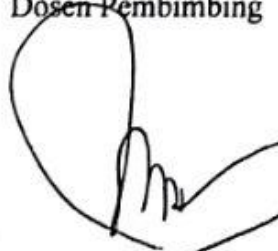
Nama : Evi Yunimartiningih
Nomor Mahasiswa : 13313089
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Februari 2018

Telah disetujui dan disahkan untuk diujikan

oleh

Dosen Pembimbing



(Dr. Jaka Sriyana SE., M.Si.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, PENDAPATAN PER KAPITA DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI JAWA
TIMUR TAHUN 2012-2016**

Disusun Oleh : **EVI YUNIMIARTININGSIH**

Nomor Mahasiswa : **13313089**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 8 Februari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Awan Setya Dewanta, Drs .,M.Ec.Dev.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada kedua orang tuaku dan suamiku tercinta serta kepada orang-orang yang membutuhkan karya ini untuk referensi

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka “

{QS. Ar Ra'd: 11}

“Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

{Ali Imran 159}

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan Perkapita dan Produk Domestik Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Timur Tahun 2012-2016” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tugas skripsi ini, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Jaka Sriyana SE.,M.Si. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Akhsyim Afandi Drs, MA, Ph.D selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu Ekonomi.
5. Seluruh dosen yang telah menyampaikan ilmunya kepada penulis selama ini, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat khususnya bagi penulis. Amin.
6. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas bantuannya selama penulis menjalani proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua dan suamiku tercinta, terimakasih atas dukungannya.
8. Seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi UII yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian penelitian, yang telah membantu penulis baik responden yang telah mengisi kuesioner, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, Aamiin.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dengan harapan agar bermanfaat bagi yang berkepentingan. Semoga skripsi ini dapat dijadikan khasanah pustaka yang mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Februari 2018

Evi Yunimiartiningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Penerimaan Daerah	15
2.2.2 Pajak Daerah	20
2.2.3 Jumlah Hotel	24
2.2.4 Kunjungan Pariwisata	25
2.2.5 Pendapatan Perkapita	28

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto	30
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Pengumpulan Data	35
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	36
3.3 Definisi Operasional Variabel	37
3.4 Analisis Data Penelitian.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Deskripsi Data	47
4.2 Pengujian Hipotesis.....	48
4.2.1 Estimasi Regresi Data Panel	48
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	49
4.2.3 Hasil Uji Hipotesis	53
4.3 Pembahasan	58
4.3.1 Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	58
4.3.2 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	58
4.3.3 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Pajak Daerah ..	60
4.3.4 Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	61
BAB V PENUTUP	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Keterbatasan Penelitian	64
5.3 Implikasi	64
DAFTAR PUSTAKA	66
Lampiran	71
Lampiran 1 Data Penelitian	72
Lampiran 2 Statistik Deskriptif	76
Lampiran 3 Estimasi Data Panel	77
A. Hasil Uji Estimasi <i>Common Effect</i>	77
B. Hasil Uji Estimasi <i>Fixed Effect</i>	78
C. Hasil Uji Estimasi <i>Random Effect</i>	79
Lampiran 4 Uji Kesesuaian Model	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	47
Tabel 4.2 Uji Kesesuain Model.....	48
Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan <i>Random Effect</i>	49

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	33
---	----

ABSTRAK

Era otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mandiri dalam melakukan pembangunan di daerah. Pembangunan yang dilakukan daerah pastilah membutuhkan sumber pemasukan untuk melakukan pembangunan tersebut. Salah satu sumber pendapatan di daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah pada dasarnya merupakan komponen dari pendapatan Asli Daerah, jadi dengan banyaknya pendapatan dari pajak daerah maka semakin banyak pula pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah jumlah hotel, wisatawan, pendapatan perkapita dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada diprovinsi Jawa Timur. Adapun metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah hotel memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap pendapatan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 dengan nilai t hitung sebesar -3.248 dan signifikansi $0,001 < 0,05$. Jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 dengan nilai t hitung sebesar 0.501 dan signifikansi $0,617 > 0,05$. Pendapatan perkapita memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahu 2012-2016. dengan nilai t hitung sebesar 5,622 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Pendapatan regional domestik bruto tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahu 2012-2016 dengan nilai t hitung sebesar -0.197 dan signifikansi $0,844 > 0,05$.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Pendapatan Perkapita, PDRB*

ABSTRACT

The era of regional autonomy requires every region to be independent in doing development in the region. The development undertaken by the region must require a source of income to carry out the development. One source of income in the region is the local tax. Local taxes are basically a component of the income of the Region, so with the large amount of revenues from local taxes, more and more local revenues are generated. The purpose of this study is to determine how the influence of the number of tourists, per capita income and Gross Regional Domestic Product to the local tax revenue in the province of East Java in 2012-2016 either partially or simultaneously. The type of research in the preparation of this thesis is explanatory research. Population in this research is all districts / cities that exist in East Java province. The sampling method using purposive sampling. Data analysis using panel data regression analysis. The results showed that the number of hotels has a significant negative influence terhadap tax revenue in East Java Province 2012-2016 with a t value of -3.248 and significance $0.001 < 0.05$. The number of tourists does not have a significant influence on tax revenue in East Java Province 2012-2016 with a t value of 0.501 and significance of $0.617 > 0.05$. Revenue per capita has a significant and positive influence on local tax revenues in the province of East Java to know 2012-2016, with a t value of 5.622 and a significance level of $0.000 < 0.05$. Gross domestic regional income has no significant influence on local tax revenues in East Java province to know 2012-2016 with t value of -0.197 and significance of $0.844 > 0.05$.

Keywords: Local Tax, Per Capita Income, GRDP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era otonomi daerah telah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya dan penentuan sektor-sektor prioritas Daerah. Era otonomi secara sederhana adalah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Sidik (2002) menyatakan jika otonomi daerah memiliki tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Adanya kewenangan untuk mengurus daerahnya ini maka Sidik (2002) menyatakan jika pemerintah daerah harus lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pembangunan di daerah. Guna memperoleh dana maka pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah menurut UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Era otonomi daerah yang saat ini berlaku di Indonesia menuntut agar setiap daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. PAD menurut Halim dan Kusufi (2012) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah disebuah daerah. Sementara itu menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Jadi salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka pajak harus memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan (Halim dan Iqbal, 2012). Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian pajak merupakan salah satu sumber dalam PAD. Jika pajak daerah mengalami peningkatan maka otomatis PAD pemerintah daerah akan semakin meningkat. Sebagai salah satu komponen dari PAD maka pemerintah daerah haruslah berupaya untuk meningkatkan pajak daerah. Guna meningkatkan pajak daerah maka pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor yang berhubungan dengan peningkatan pajak daerah.

Faktor yang dapat berhubungan dengan peningkatan pajak daerah adalah jumlah hotel. Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Yogyakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui

penerimaan Pajak Hotel. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel maka dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah di Jawa Timur. Jika jumlah hotel bertambah dengan sendirinya akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak daerah melalui pajak hotel (Aliandi dan Handayani, 2013). Hasil kajian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2013) membuktikan jika jumlah hotel berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aliandi dan Handayani, 2013) membuktikan jika jumlah hotel berdampak negatif terhadap penerimaan pajak, namun tidak signifikan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah kunjungan wisatawan. Menurut *World Tourism Organization* (WTO) pengunjung (visitor) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjungi (Antari, 2013). Dengan semakin meningkatnya kunjungan wisata maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar daerah tujuan wisatawan.

Menurut Clement, (dalam Yoeti, 2008) wisatawan yang datang di suatu negara atau destinasi, mereka pasti akan membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya selama mereka tinggal di negara atau destinasi tersebut. Uang yang dibelanjakan wisatawan itu, setelah dibelanjakan tidak pernah berhenti beredar, akan tetapi berpindah dari satu tangan ke tangan orang lain atau dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Setelah melalui beberapa kali transaksi dalam periode satu tahun, baru akan berhenti dari peredarannya bila uang itu tidak

lagi memberi pengaruh terhadap perekonomian negara atau destinasi yang dikunjungi.

Domanski dan Gwosdz (2010), menyatakan bahwa kunjungan pariwisata dapat menjadi *multiplier effect*. *Multiplier effect* dari kunjungan pariwisata dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu pertumbuhan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah atau pelayanan terhadap masyarakat. Itu berarti, jika dikaitkan dengan pariwisata di Jawa Timur dengan pendapat yang dikemukakan oleh Domanski dan Gwosdz terkait konsep *multiplier effect*nya, maka kita akan berbicara mengenai pajak dan pungutan-pungutan yang diambil dari tempat pariwisata yang ada di Jawa Timur. Industri pariwisata di Jawa Timur secara tidak langsung akan menimbulkan dampak yang signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan pajak daerah dan akan diteruskan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Itu berarti, semakin baik perkembangan industri pariwisata di Jawa Timur maka semakin banyak pajak yang bisa dipunguti oleh pemerintah daerah dan semakin banyak pula dana yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan memajukan regional tersebut, begitu pula sebaliknya.

Hasil ini penelitian yang dilakukan oleh Aji (2013) membuktikan jika jumlah wisatawan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningtyas (2003) yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerimaan pajak daerah. Jadi jumlah kunjungan wisatawan yang semakin besar maka dapat meningkatkan pajak daerah.

Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah lainnya adalah pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita menurut Sukirno (2004) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut Ausri (2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Digdaya (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Rakiman (2013) serta penelitian yang dilakukan oleh Haniz dan Sasana (2013) yang membuktikan jika pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Jadi dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat di Jawa Timur akan dapat meningkatkan pajak daerah di Jawa Timur.

Faktor lainnya adalah Produk Domestik Regional Bruto. menurut Bambang dan Aristanti (2007) PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang di produksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah (region). Sedangkan PDRB menurut Purnastuti dan Mustikawati (2008) merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan selama kurun waktu satu tahun pada suatu wilayah

regional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Digdaya (2015), Arianto (2014) dan Marliyanti dan Arkadimana (2014) bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah karena apabila PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat (Nurcholis, 2007).

Dari uraian di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan Per Kapita dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016?

5. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 201-2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak.

2. Ilmu Pengetahuan

Pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang lain. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat menambah kajian mengenai sektor penerimaan pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Menguraikan penelitian terdahulu, Landasan teori dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Jenis dan cara pengumpulan data, Definisi Operasional Variabel, dan Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Memaparkan data penelitian, menyajikan hasil penelitian dan analisis hasil.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan simpulan dan Implikasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yang *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2013) bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan laju inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang tahun 2011-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data runtun waktu (time series) untuk periode tahun 2011-2014. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa, variabel jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang tahun 2011-2014 sedangkan variabel jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang.

Kedua, penelitian yang dilakukan Aji (2013) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri dalam era desentralisasi fiskal dari tahun 2006-2011. Penelitian ini menggunakan data penerimaan Pajak Daerah, jumlah wisatawan, jumlah industri (kecil, menengah, dan besar), dan jumlah daya listrik tersambung. Hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah wisatawan dan jumlah daya listrik tersambung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri, sedangkan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agustiningtyas (2003) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1998- 2001. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dipenda, Biro Perekonomian Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data pooling, yaitu gabungan antara data runtut waktu (Time series) selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 1998-2001 dan data silang tempat (*Cross Section*) dari 35 kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah, sehingga diperoleh 140 obyek penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, jumlah wisatawan, investasi pemerintah dan daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan pengaruh jumlah hotel tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rakiman (2013) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pendapatan perkapita dan jumlah wajib terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dalam bentuk logaritma natural dengan menggunakan metode OSL. Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Digdaya (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, dan produk

domestik regional bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota pada tahun 2011-2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode cluster sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel obyek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. 105 sampel penelitian ini didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan software SPSS versi 19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Haniz dan Sasana (2013) bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kota Tegal selama 20 tahun tahun pengamatan, yaitu sejak tahun 1991 sampai 2010. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Wilayah Pengelolaan Revenue dan Asset Management (DPPAD) Tegal. Data yang diambil adalah data penerimaan pajak, pendapatan per kapita, wajib pajak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, pembayar pajak, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Kota Tegal sejak tahun 1991 sampai dengan

tahun 2010 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Tegal, sementara inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Tegal.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Murib dkk (2016) meneliti pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire Papua pada tahun 2004-2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian *kedelapan* adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangli. Penelitian ini menggunakan data skunder, dan dianalisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Di pihak lain terdapat pengaruh tidak langsung dari jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata dan merupakan variabel mediasi. Dari hasil analisis dapat disarankan bahwa hendaknya pemerintah Kabupaten Bangli

lebih gencar melakukan promosi pariwisata agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian *kesembilan* adalah penelitian yang dilakukan oleh Tendeand dkk (2014). Pengembangan sektor pariwisata secara terpadu merupakan peluang strategis yang dapat menguntungkan daerah terutama angkatan kerja produktif dan berkualitas dalam upaya peningkatan produktivitas sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penunjang PAD yang signifikan. Kota Manado merupakan pusat pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara beberapa sektor yang dapat di kembangkan yaitu sektor pariwisata. budaya dan kesenian merupakan bagian yang dapat di andalkan dari Kota Manado yang berkontribusi sangat besar terhadap sektor perdagangan dan perhotelan yang nantinya di harapkan dapat berimbas pada meningkatnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui analisis jalur maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap PAD, sehingga bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan PAD, jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap pajak hotel, sehingga bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan pajak hotel, jumlah wisatawan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap PAD melalui pajak hotel sebagai variabel *intervening*.

Penelitian *kesepuluh* adalah penelitian yang dilakukan oleh Sihotang dkk (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah wisatawan domestik dan asing. wisatawan prihatin dengan pendapatan daerah Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini

menggunakan data laporan anggaran pendapatan dan data aktual mengenai wisatawan Jakarta. Kemudian hasilnya diperoleh bahwa kunjungan wisatawan ke Jakarta memiliki hubungan dengan pendapatan (PAD).

Penelitian *kesebelas* adalah penelitian yang dilakukan oleh Rafsanjani (2015). Penelitian ini dilakukan pada kondisi ekonomi makro antara lain tingkat inflasi, pengangguran, dan pendapatan per kapita regional periode 2004 sampai dengan periode 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, dan juga sumber dari situs website yang memiliki domain resmi dan terpercaya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan metode interpolasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil yang diperoleh dari uji F adalah yaitu variabel-variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan untuk uji T didapatkan bahwa tingkat inflasi, jumlah pengangguran, dan pendapatan per kapita regional mempunyai pengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Penelitian *keduabelas* adalah penelitian yang dilakukan oleh Marliyanti dan Sudarsana Arka (2014). Salah satu faktor yang mempengaruhi sumber PAD adalah pertumbuhan PDRB. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh langsung PDRB terhadap Pajak Daerah dan PAD, pengaruh langsung Pajak Daerah terhadap PAD, dan Pengaruh Tidak langsung PDRB terhadap PAD Kota Denpasar melalui

Pajak Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Kota Denpasar, yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh secara langsung terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Denpasar, Pajak Daerah berpengaruh secara langsung terhadap PAD Kota Denpasar dan PDRB berpengaruh secara tidak langsung terhadap PAD melalui Pajak Daerah Kota Denpasar.

Penelitian *ketigabelas* Arianto (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah, (2) Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah, dan (3) Pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, (2) inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah dan (3) PDRB berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya. Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa Pajak daerah dapat dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Penerimaan Daerah

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1999, bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Dapat mengumpulkan pajak daerah yang telah disetujui pemerintah pusat
2. Melakukan pinjaman

3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak negara yang dipungut di daerah
4. Menambah tarif pajak negara tersebut
5. Menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat

Menurut Nurcholis (2007:182) sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggraini dan Puranata (2010) besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan pemerintah atasan semakin berkurang. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek PAD antara lain untuk provinsi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Menurut Rahayu (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk pemerintahan. Peranan PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di lingkungannya masing-masing. Semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melakukan

berbagai kegiatan yang bersifat mandiri, dan semakin besar pula kekuasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan penggunaan keuangan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan skala prioritas daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dijelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Sebagai pendapatan pajak daerah, setiap pajak harus memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan (Halim dan Iqbal, 2012). Menurut Mardiasmo (2011) mengatakan pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Hasil Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2010) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut Darise (2009) retribusi daerah dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu pertama retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan. Kedua adalah retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Ketiga retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Aji dkk (2015) menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dinyatakan dalam UU No 33 Tahun 2004 mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Sementara Aji dkk (2015) menyebutkan bahwa dalam PP No 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menurut Darise (2007) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan antara Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil menurut Darise (2007) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Nordiawan dkk (2008) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009)

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Darise (2007) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

2.2.2 Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sementara itu menurut Siahaan (2010) pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun menurut Adisasmita (2011) pajak daerah merupakan kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Sementara itu menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2017 pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas maka penyusun menyimpulkan jika pajak daerah merupakan iuran yang diberbankan kepada orang atau badan yang dapat dipaksakan. Jadi pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan merupakan salah satu sumber pendapatan dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah pajak menurut Sari (2013) memiliki dua fungsi yaitu sebagai fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Pajak sebagai fungsi penerimaan karena pajak merupakan sumber pemasukan dalam kas negara atau daerah dengan tujuan membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sementara itu sebagai fungsi pengatur pajak dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan).

3. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) ada empat jenis tarif yang dibebankan kepada masyarakat yaitu:

- a. Tarif proporsional merupakan tarif berupa persentase yang tetap terhadapberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- b. Tarif tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2017 terdiri dari lima jenis yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Setiap penyediaan dan/atau penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air dipungut PBBKB.

Pembelian bahan bakar yang dilakukan oleh industri usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar :

- 1) untuk sektor industri dipungut sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.
- 2) untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.
- 3) untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik

yang berada di laut maupun di darat. Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah dipungut PAP. Pungutan PAP dikecualikan untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan bagi keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

e. Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Setiap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah dikenakan Pajak Rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

2.2.3 Jumlah Hotel

Hotel memegang peran penting dalam industri pariwisata, hal dikarenakan tidak sedikit orang enggan mengunjungi daerah wisata karena ketiadaan sarana hotel yang memadai. Hotel menurut Bataafi (2005) merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Berkaitan dengan jumlah hotel maka dapat diartikan banyaknya jumlah akomodasi yang digunakan untuk menginap yang dikelola secara komersil. Berkaitan dengan penerimaan pajak maka sedikit banyaknya jumlah hotel dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total pendapatan hotel. Jadi semakin banyak jumlah hotel maka dapat semakin banyak

menarik minat masyarakat untuk menginap dan akan semakin banyak pula pajak yang disetorkan kepada pemerintah.

2.2.4 Kunjungan Pariwisata

World Tourism Organization (WTO) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pengunjung (visitor) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjungi (Antari, 2013). Antari, 2013) ada dua kategori pengunjung, yaitu

1. Wisatawan (*tourist*) yaitu pengunjung yang tinggal sementara sekurangnya selama 24 jam di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut.
 - a. Pesiar (*leisure*), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olahraga.
 - b. Hubungan dagang (*business*), keluarga, konferensi, misi, dan lain sebagainya.
2. Pelancong (*excursionist*) yaitu pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pengunjung dalam penelitian ini adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada objek dan daya tarik wisata, yang dalam hal ini adalah objek wisata di Jawa Timur sebagai lokasi penelitian baik dalam pengertian wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Ada dua faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan menurut Hidayat (2011) yaitu

1. Aspek Penawaran Pariwisata

Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto 2005), ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Attraction* (daya tarik); daerah tujuan wisata (selanjutnya disebut DTW) untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya.
- b. *Accesable* (transportasi); *acesable* dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata
- c. *Amenities* (fasilitas); amenities memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan nyaman tinggal lebih lama di DTW.
- d. *Ancillary* (kelembagaan); adanya lembaga pariwisata wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan, (protection of tourism) dan terlindungi.

Sementara Smith, 1988 (dalam Pitana, 2005) mengklasifikasikan berbagai barang dan jasa yang harus disediakan oleh daerah tujuan wisata menjadi enam kelompok besar, yaitu: (1) *Transportation*, (2) *Travel services*, (3) *Accommodation*, (4) *Food services*, (5) *Activities and attractions (recreation culture/entertainment)*, dan (6) *Retail goods*.

2. Aspek Permintaan Pariwisata

Permintaan pariwisata berpengaruh terhadap semua sektor perekonomian, perorangan (individu), Usaha Kecil Menengah, perusahaan swasta, dan sektor pemerintah (Sinclair dan Stabler, 1997). Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto, 2005), faktor-faktor utama dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harga

Harga yang tinggi pada suatu daerah tujuan wisata akan memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan bepergian, sehingga permintaan wisata pun akan berkurang begitu pula sebaliknya.

b. Pendapatan

Apabila pendapatan suatu negara tinggi, kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi dan bisa jadi calon wisatawan membuat sebuah usaha pada Daerah Tujuan Wisata jika dianggap menguntungkan.

c. Sosial Budaya

Adanya sosial budaya yang unik dan bercirikan atau berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata berasal maka, peningkatan permintaan terhadap wisata akan tinggi hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai khasanah kekayaan pola pikir budaya wisatawan.

d. Sosial Politik

Dampak sosial politik belum terlihat apabila keadaan Daerah Tujuan Wisata dalam situasi aman dan tenteram, tetapi apabila hal tersebut berseberangan dengan kenyataan, maka social politik akan sangat terasa dampak dan pengaruhnya dalam terjadinya permintaan.

e. Harga Barang Substitusi

Harga barang pengganti juga termasuk dalam aspek permintaan, dimana barang-barang pengganti dimisalkan sebagai pengganti Daerah Tujuan Wisata yang dijadikan cadangan dalam berwisata seperti: Bali sebagai tujuan wisata utama di Indonesia, akibat suatu dan lain hal Bali tidak dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi syarat-syarat Daerah Tujuan Wisata sehingga secara tidak langsung wisatawan akan mengubah tujuannya ke daerah terdekat seperti Malaysia dan Singapura.

2.2.5 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita menurut Sukirno (2004: 423) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut Ausri (2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

Manfaat menghitung pendapatan per kapita secara umum adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu negara/daerah, jika pendapatan per kapita tinggi berarti perekonomian sudah maju, demikian pula sebaliknya.
2. Dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara/daerah jika pendapatan per kapita riil tinggi berarti kemakmuran suatu negara sudah tinggi demikian pula sebaliknya.
3. Dapat melihat perkembangan perekonomian dan kemakmuran suatu daerah/negara, dengan cara membandingkan besarnya pendapatan per kapita dari tahun ke tahun.
4. Dapat membandingkan tingkat kemakmuran (standar hidup) antar negara/daerah, apakah tergolong kelompok rendah, menengah, atau tinggi;
5. Dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan ekonomi bagi pemerintah daerah/negara.
6. Dapat memberikan data-data mengenai kependudukan, seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, dan penyebaran penduduk dari tiap daerah.

Ada dua cara untuk menghitung pendapatan per kapita yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan harga yang sedang berlaku dan berdasarkan harga tetap (konstan).
Jika kita menghitung berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal. Pendapatan per kapita nominal

merupakan pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.

2. Berdasarkan harga tetap (konstan), hasilnya disebut pendapatan per kapita riil. Pendapatan per kapita riil merupakan pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto

1. Pengertian

Menurut BPS Jawa Timur (2017) Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Sementara itu menurut Bambang dan Aristanti (2007) PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang di produksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah (region). Sedangkan PDRB menurut Purnastuti dan Mustikawati (2008) merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan selama kurun waktu satu tahun pada suatu wilayah regional.

Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektorsektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Menurut Trikunawaningsih dan Pracoyo (2005) Produk domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku adalah PDRB total yang nilai berdasarkan harga-harga sekarang (harga yang sedang berlaku). Sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan menurut Arifin (2007) yaitu tahun ketika perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga harga-harga tetap stabil atau konstan. Adapun pada penelitian ini PDRB menggunakan harga berlaku karena lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Pendekatan dala PDRB

Menurut BPS Jawa Timur (2017) untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini menurut Trikunawaningsih dan Pracoyo (2005) dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan

- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

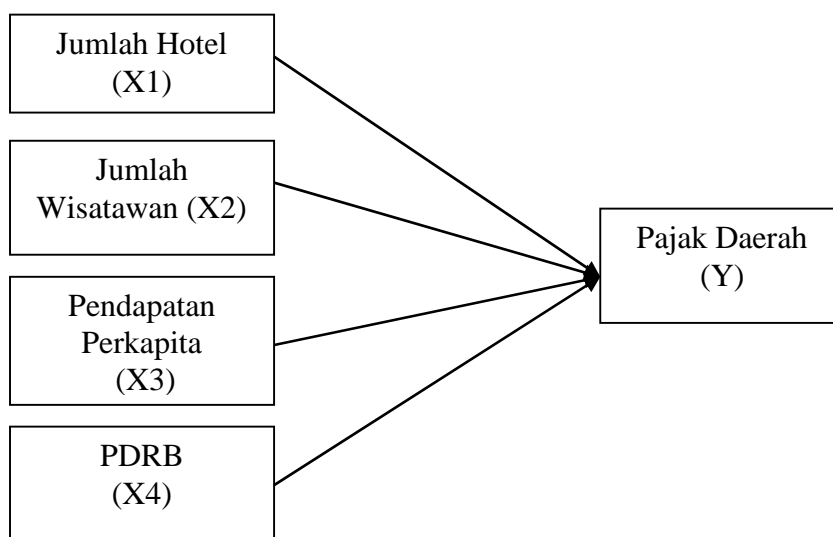
PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- 1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- 2) pengeluaran konsumsi pemerintah
- 3) pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) perubahan inventori, dan
- 5) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Dari kajian pustaka dan landasan teori yang telah diuraikan di atas maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan kerangka pikir di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah hotel dengan pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016

- Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah wisatawan dengan pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016
- Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan perkapita dengan pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016
- Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan Domestik Regional Bruto dengan pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian eksplanatori menurut Singarimbun dan Effendi (2006) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Alasan utama dalam penelitian eksplanatori adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan melalui penelitian ini dapat dijelaskan pengaruh dari variabel bebas dan variabel terikat yang ada dalam hipotesis tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari survei instansional melalui sumber yang relevan dengan topik yang diteliti, yaitu dari instansi terkait BPS (Badan Pusat Statistik setiap Kabupaten di Jawa Timur) dan sumber data lainnya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, yaitu mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, antara lain buku, jurnal, laporan dari lembaga terkait dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sehingga peneliti mengambil data menurut waktu pengumpulanya, yaitu data panel. Data panel merupakan data gabungan antara *time series* dengan data *cross-sectional*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah wisatawan, pendapatan per kapita, dan penerimaan pajak daerah dari tahun 2013-2016.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2010) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain:

1. Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur selama periode pengamatan 2012-2016.
2. Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur mempublikasikan data yang lengkap yaitu data pendapatan perkapita, jumlah kunjungan wisata, PDRB dan pajak daerah

Berdasarkan kriteria di atas maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kab Pacitan, Kab Bangkalan, Kab Banyuwangi, Kab Blitar, Kab Bojonegoro, Kab Bondowoso, Kab Gresik, Kab Malang, Kab Ngawi, Kab Sumenep, Kab Tulungagung, Kab Tuban, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Arikunto (2002:9) variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian. Dikemukakan juga oleh Hadi (2004:260) variabel adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya maupun dalam tingkatannya yang menjadi sasaran pendidikan. Dari kedua pendapat tersebut maka variabel dapat diartikan sebagai objek penelitian atau sasaran penyelidikan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya, maupun dalam tingkatannya.

Menurut Arikunto (2002:101) yang intinya bahwa variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, variabel bebas atau independent variabel (X), sedangkan variabel akibat disebut variabel tak bebas, variabel terikat atau dependent variabel (Y). Variabel terikat atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo, (2002:5) pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala kontinyu dengan satuan ribuan rupiah (Rp/tahun).

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Hotel

Jumlah keseluruhan dari hotel yang ada di setiap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dalam 1 tahun (hotel). Dalam satuan unit.

2. Jumlah Wisatawan

Merupakan besarnya jumlah wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara yang berkunjung ke Jawa Timur tahun 2013-2016 (orang/tahun). Jumlah wisatawan total yang mengunjungi masing-masing Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dalam 1 tahun (orang/tahun).

3. Pendapatan Pekapita

Pendapatan Per Kapita menurut Dumairy (1999) merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam satu periode tertentu. Penghitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk tiap daerah. Pendapatan perkapita dalam penelitian ini menggunakan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan 2010 masing-masing Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dalam 1 tahun. Dalam satuan triliun rupiah.

4. Produk Domestik Regional Bruto

Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah gambaran dari suatu provinsi mengenai kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB pada penelitian ini menggunakan harga berlaku. Dalam satuan triliun rupiah.

3.4 Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi data panel. Regresi data panel menurut Sriyana (2014) adalah regresi dengan menggabungkan sekaligus data *cross-section* dan *time-series* dalam sebuah persamaan. Regresi ini dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi saat melakukan regresi dengan data *cross-section* atau data *time-series* secara terpisah. Regresi ini dikembangkan juga dengan alasan efisiensi dalam melakukan estimasi.

3.1.1 Estimasi Model Data Panel

Menurut Sriyana (2014) dalam melakukan estimasi dalam model dengan regresi data panel, terdapat tiga model yang sering ditawarkan, yaitu *Ordinary Least Square (common effect)*, model efek tetap (*fixed effect*), dan model efek acak (*random effect*). Penjelasan dari masing-masing model tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode *Ordinary Least Square (Common Effect)*

Teknik yang paling sederhana mengasumsikan bahwa data gabungan (data *time series* dan *cross section*) yang ada, menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu. Metode ini sering disebut dengan *common effect* (Gujarati, 2003: 640). Untuk menganalisa teknik ini dapat menggunakan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). Metode OLS merupakan salah satu metode populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linier. Secara umum,

persamaan modelnya menurut Winarno (2009: 9.11) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \epsilon_{it}$$

Y_{it}	= Variabel respon (Pendapatan pajak daerah)
$X_1 - X_2$	= Variabel prediktor (Jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan produk domestik bruto)
α_0	= Koefisien <i>slope</i> atau koefisien arah
ϵ_{it}	= Konstanta
i	= komponen <i>error</i>
t	= Objek
	= waktu observasi

2. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Analisis dengan metode *Ordinary Least Square (Common Effect)* menganggap bahwa semua objek pada semua waktu adalah sama sehingga menimbulkan kelemahan. Kelemahan asumsi ini adalah ketidak sesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama.

Model ini dikenal dengan model regresi *fixed effect* (efek tetap). Efek tetap di sini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dan waktu ke waktu (*time invariant*). Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut dengan *Least Squares*

Dummy Variables dan disingkat LSDV. Persamaan modelnya menurut Widarjono (2009: 233) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 D_{1i} + \alpha_4 D_{2i} + \epsilon_{it}$$

Y_{it}	= Variabel respon (Pajak daerah)
$X_1 - X_2$	= Variabel prediktor (Jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan produk domestik bruto)
α_0	= Koefisien <i>slope</i> atau koefisien arah
ϵ_{it}	= Konstanta
i	= komponen <i>error</i>
t	= Objek
$D_{1i} - D_{2i}$	= waktu observasi
	= Variabel semu (<i>dummy</i>)

Perhatikan bahwa konstan α_0 sekarang diberi subskrip i yang menunjukkan objeknya. Dengan demikian masing-masing objek memiliki konstan yang berbeda. Variabel semu $d_{1i} = 1$ untuk objek pertama dan 0 untuk objek lainnya dan seterusnya.

3. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Model *random effect* ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Gujarati (2003:645) *model random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*. Guna mengatasi masalah tersebut maka dapat menggunakan pendekatan efek acak atau *random effect*). Persamaan modelnya menurut Winarno (2009: 9.17) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$

dengan:

- Y_{it} = Variabel respon pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t
 X_{it} = Variabel prediktor pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t
 β = Koefisien *slope* atau koefisien arah
 α = Intersep model regresi
 μ_i = Galat atau komponen error pada unit observasi ke- i
 ϵ_{it} = komponen *error*

3.1.2 Uji Kesesuaian Model

Pemilihan dalam model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan pengujian berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh model yang terbaik agar hasil dugaan yang diperoleh efisien. Guna memilih salah satu model estimasi yang dianggap paling tepat dari tiga jenis model data panel maka perlu dilakukan serangkaian uji (tes). Uji ini menurut Widarjono (2009: 238) terdiri dari *chow test* (uji F-statistik), uji *langrange multiplier (LM test)*, dan uji Hausman.

1. Uji Chow

Dalam menguji kesesuaian model penelitian ini, kedua metode baik *pooled least square* maupun *fixed effect* model dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Chow (*Chow Test*). *Chow test* (uji F-statistik) adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *pooled least square* atau *fixed effect* (Widarjono, 2005: 263). Hipotesis dalam pengujian ini dapat dilakukan sebagai berikut.

$H_0 = \text{Pooled least square.}$

$H_1 = \text{Fixed effect.}$

Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan dibawah ini:

Menerima H_0 jika Uji-F nilai probabilitinya $> \alpha$ 5 persen (0,05);

Menerima H_1 jika Uji-F nilai probabilitinya $< \alpha$ 5 persen (0,05).

2. Uji *Langrange Multiplier*

Uji *langrange multiplier* adalah suatu pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan *pooled least square* atau *random effect*. Uji ini bisa dinamakan uji signifikansi *random effect* yang dikembangkan oleh Bruesch-Pagan (1980) dalam Desmiwati (2010: 53). Uji Bruesch-Pagan ini didasarkan pada nilai residual dari metode *common effect*. Hipotesis dalam pengujian ini dapat dilakukan sebagai berikut.

$H_0 = \text{Pooled least square.}$

$H_1 = \text{Random effect.}$

Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan dibawah ini:

Menerima H_0 jika Uji-F nilai probabilitinya $> \alpha$ 5 persen (0,05);

Menerima H_1 jika Uji-F nilai probabilitinya $< \alpha$ 5 persen (0,05).

3. Uji Hausman

Uji Hausman adalah suatu pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan *fixed effect model* atau

random effect model (Widarjono, 2005: 264). Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut.

$H_0 = \text{Random effect model.}$

$H_1 = \text{Fixed effect model.}$

Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan dibawah ini:

Menerima H_0 jika Uji Hausman nilai probabilitinya $> \alpha 5$ persen;

Menerima H_1 jika Uji Hausman nilai probabilitinya $< \alpha 5$ persen.

Model yang diperoleh dari uji Hausman, akan digunakan sebagai model analisa yang digunakan dalam penelitian ini.

3.1.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian tersebut menurut Gujarati, (2003: 257) meliputi uji F statistik, uji t statistik dan analisis koefisien determinasi (R^2).

1. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F statistik dilakukan untuk menguji pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara simultan. F statistik yang signifikan lebih besar dari F tabel pada tingkat resiko kesalahan () yang diambil (Gujarati, 2001: 81).

Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis dengan *one tailed*, yaitu sebagai berikut.

Ha: Ada pengaruh yang berarti secara simultan pada variabel independen terhadap variabel dependen (pajak daerah).

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, Jika $F_{statistik} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

2. Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain konstan (Gujarati, 2001: 78). Hipotesis nol yang digunakan adalah:

Ha: Variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Signifikansi pengaruh tersebut dapat di estimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung. Jika nilai t hitung $> t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin Besar R^2 maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan variabel bebas semakin tinggi dan semakin kecil R^2 , maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah (Gujarati, 2003: 13).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Deskripsi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyederhanaan data-data yang berhasil di kumpulkan kedalam data statistik. Data statistik dalam penelitian ini terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. Setelah dilakukan pengolahan statistik deskriptif dengan bantuan software SPSS 21 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Deskriptif	Pajak Daerah	Jumlah Hotel	Jumlah Wisatawan	Pendapatan Perkapita	PDRB
Minimum	5.954.675.925	4	20.439	13.002.100	3.545.800.000.000
Maximum	3.000.152.510.888.000	175	20.438.755	157.730.200	451.535.900.000.000
Mean	121.533.144.307.224	34,611	2.076.466	37.598.692	51.135.221.176.471
Std. Deviation	554.022.262.268.407	40,285	3.783.095	28.023.782	84.672.651.210.800

Sumber: Data diolah (2017)

Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa ada 84 data penelitian. Pada tahun 2012-2016 pajak daerah di provinsi Jawa Timur secara rata-rata adalah 121,5 T dengan pajak daerah terendah adalah di kabupaten Pacitan pada tahun 2012 yaitu hanya sebesar 5 M. Adapun pajak daerah tertinggi adalah 3.000 T terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2016. Sementara itu jumlah hotel secara rata-rata adalah 34,611 dengan jumlah hotel terbanyak ada di kota surabaya dengan jumlah hotel 175 hotel dan paling sedikit ada di kabupaten Bangkalan yaitu sebanyak 4 hotel.

Jumlah wisatawan di provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2012-2016 rata-rata 2.07 Juta, jumlah wisatawan tertinggi terjadi di Kota Surabaya dengan

jumlah wisatawan sebanyak 20.43 Juta pada tahun 2016. Adapun jumlah kunjungan wisata terendah terjadi di kabupaten Pasuruan dengan jumlah pariwisata sebanyak 20,4 Ribu yang terjadi pada tahun 2012. Sementara itu pendapatan perkapita pada tahun 2012-2016 di provinsi Jawa Timur secara rata-rata 37,5 Juta dengan pendapatan perkapita tertinggi adalah sebesar 157 Juta di kota Surabaya tahun 2016. Sementara itu tingkat pendapatan perkapita terendah adalah di kabupaten Ngawi pada tahun 2012 dengan jumlah pendapatan perkapita hanya 13.002 Juta.

Adapun pada variabel PDRB secara rata-rata adalah 51.1 T, dengan PDRB terbesar adalah 451.5 T di kota Surabaya pada tahun 2016. Sementara PDRB terendah adalah sebesar 3.5 T yaitu pada daerah Kota Blitar pada tahun 2012

4.2 Pengujian Hipotesis

4.2.1 Estimasi Regresi Data Panel

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya jika dalam analisis data panel ada tiga model yang ditawarkan yaitu *ordinary Least Square (common effect)*, model efek tetap (*fixed effect*), dan model efek acak (*random effect*). Setelah dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Kesesuaian Model

Variabel Y	Uji Model	Hasil	Kesimpulan
Pajak Daerah	<i>Chow Test (Common effect or fixed effect)</i>	0.000	<i>Fixed Effect</i>
	<i>Hasuman Test (fixed effect or Random effect)</i>	0.0249	<i>Random Effect</i>

Sumber: Data diolah (2017)

Dari tabel 4.2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang sesuai dalam penelitian ini adalah model *random effect*. Kesimpulan ini diperoleh dari

serangkain pengujian yang dilakukan yaitu uji *chow test*. Dari uji *chow test* diperoleh hasil bahwa model yang baik dari penelitian ini adalah *fixed effect*. Pada hasil uji *hasuman test* hasilnya menyimpulkan bahwa model yang terbaik dalam penelitian ini adalah model estimasi *fixed effect*.

4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.32375	25.60874	1.223166	0.2258
LNJH?	-1.890351	0.581852	-3.248852	0.0018
LNJW?	0.075056	0.149675	0.501460	0.6178
LNPPK?	1.01E-07	1.79E-08	5.622649	0.0000
LNPDRB?	-0.170695	0.865960	-0.197116	0.8444
Fixed Effects (Cross)				
_KAB_PACITAN--C	-0.269790			
_KAB_BANGKALAN--C	-2.565142			
_KAB_BANYUWANGI--C	2.878101			
_KAB_BLITAR--C	0.627200			
_KAB_BOJONEGORO--C	-0.573755			
_KAB_BONDOWOSO--C	-0.150504			
_KAB_GRESIK--C	-2.574010			
_KAB_MALANG--C	4.689016			
_KAB_NGAWI--C	-0.202941			
_KAB_SUMENEP--C	-1.446275			
_KAB_TULUNGAGUNG--C	0.925748			
_KAB_TUBAN--C	0.711509			
_KOTA_BLITAR--C	-1.807532			
_KOTA_MALANG--C	2.039065			
_KOTA_MOJOKERTO--C	-2.675904			
_KOTA_PASURUAN--C	-3.034495			
_KOTA_SURABAYA--C	3.429710			
Effects Specification				
R-squared	0.958536	Mean dependent var	25.14486	
Adjusted R-squared	0.945578	S.D. dependent var	2.587898	
S.E. of regression	0.603717	Akaike info criterion	2.038928	
Sum squared resid	23.32636	Schwarz criterion	2.642406	
Log likelihood	-65.65443	Hannan-Quinn criter.	2.281664	
F-statistic	73.97499	Durbin-Watson stat	2.154318	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Uji dengan *E-Views 7.0*

Pada persamaan di atas, ditunjukkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta () = 31.323

Artinya apabila variabel jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 tetap sebesar 31.323.

2. Konstanta PD_Kab Pacitan = -0.269

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Pacitan akan mengalami penurunan sebesar 0.269.

3. Konstanta PD_Kab Bangkalan = -2.565

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Bangkalan akan mengalami penurunan sebesar 2.565.

4. Konstanta PD_Kab Banyuwangi = 2.878

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi akan tetap sebesar 2.878.

5. Konstanta PD_Kab Blitar = 0.627

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Blitar akan tetap sebesar 0.627.

6. Konstanta PD_Kab Bojonegoro = -0.573

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro akan tetap sebesar 0.573.

7. Konstanta PD_Kab Bondowoso = -0.150

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Bondowoso akan mengalami penurunan sebesar 0.150.

8. Konstanta PD_Kab Gresik = -2.574

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Gresik akan mengalami penurunan sebesar 2.574.

9. Konstanta PD_Kab Malang = 4.689

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Malang akan tetap sebesar 4.689.

10. Konstanta PD_Kab Ngawi = -0.202

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Ngawi akan tetap sebesar 0.202.

11. Konstanta PD_Kab Sumenep = -1.144

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Sumenep akan mengalami penurunan sebesar 1.144.

12. Konstanta PD_Kab Tulungagung = 0.925

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Tulungagung akan tetap sebesar 0.925.

13. Konstanta PD_Kab Tuban = 0.711

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kabupaten Tuban akan tetap sebesar 0.771.

14. Konstanta PD_Kota Blitar = -0.807

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kota Blitar akan mengalami penurunan sebesar 0.807.

15. Konstanta PD_Kota Malang = 2.039

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kota Malang akan tetap sebesar 2.039.

16. Konstanta PD_Kota Mojokerto = -2.675

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kota Mojokerto akan mengalami penurunan sebesar 2.675.

17. Konstanta PD_Kota Pasuruan = -3.034

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kota Pasuruan akan mengalami tetap sebesar 3.034.

18. Konstanta PD_Kota Surabaya = 3.429

Artinya jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB tidak ada atau sama dengan nol maka pajak daerah di Kota Surabaya akan tetap sebesar 3.429.

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis

1. Pengujian Secara Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005: 84).

1. Pengujian pengaruh anatara jumlah hotel terhadap pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016

Perumusan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a):

Ho: tidak terdapat pengaruh antara pengaruh jumlah hotel terhadap pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016

Ha: terdapat pengaruh antara jumlah hotel terhadap pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016

Pengambilan keputusan dengan taraf signifikansi 5 persen ditentukan sebagai berikut:

1) Bila nilai signifikansi $> 0,05$, maka Ho diterima dan menolak Ha.

2) Bila nilai signifikansi $< 0,05$, maka Ho ditolak dan menerima Ha.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar -3.248 dengan sig. t sebesar 0.001 ($p < 0,05$), sehingga keputusannya menerima Ho dan menolak Ha. Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah hotel terhadap pendapatan pajak di Jawa Timur tahun 2012-2016.

2. Pengujian pengaruh antara jumlah wisatawan terhadap pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016

Perumusan hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha):

Ho: tidak terdapat antara pengaruh jumlah wisatawan terhadap pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016

Ha: terdapat pengaruh antara jumlah wisatawan terhadap pajak daerah di Jawa Timur 2012-2016

Pengambilan keputusan dengan taraf signifikansi 5 persen ditentukan sebagai berikut:

3) Bila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan menolak H_a .

4) Bila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar 0.501 dengan sig. t sebesar 0.617 ($p > 0,05$), sehingga keputusannya menerima H_0 dan menolak H_a . Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah wisatawan terhadap pendapatan pajak di Jawa Timur tahun 2012-2016.

3. Pengujian pengaruh antara pendapatan perkapita terhadap pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016.

Perumusan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

H_0 : tidak terdapat pengaruh antara pendapatan perkapita dengan pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016.

H_a : terdapat pengaruh antara pendapatan perkapita dengan pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016.

Pengambilan keputusan dengan taraf signifikansi 5 persen ditentukan sebagai berikut.

1) Bila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan menolak H_a

2) Bila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar 5.622 dengan sig. t sebesar 0,000 ($p < 0,05$), sehingga keputusannya menolak H_0 dan menerima H_a . Berarti ada pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel pendapatan perkapita terhadap pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

4. Pengujian pengaruh anatra PDRB terhadap pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2017.

Perumusan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

H_0 : tidak terdapat pengaruh antara PDRB dengan pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016.

H_a : terdapat pengaruh antara PDRB dengan pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016.

Pengambilan keputusan dengan taraf signifikansi 5 persen ditentukan sebagai berikut.

3) Bila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan menolak H_a

4) Bila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar -0.197 dengan sig. t sebesar $0,844$ ($p < 0,05$), sehingga keputusannya menerima H_0 dan menolak H_a . Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan perkapita dengan pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

2. Pengujian Secara Serempak (Uji F)

Guna membuktikan apakah secara serempak variabel independen yakni jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur 2012-2016 maka digunakan uji F. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut.

a. Hipotesis nihil dan hipotesis alternatif

Ho: Berarti secara serempak tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB terhadap pendapatan pajak daerah.

Ha: Berarti secara serempak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB terhadap pendapatan pajak daerah.

b. *Level of* signifikan $\alpha = 0,05$.

c. Penentuan kriteria pengujian

Ho diterima apabila sig. F hitung $> 0,05$.

Ho ditolak apabila sig. F hitung $< 0,05$.

d. Nilai F hitung = 26,216 dengan sig. F = 0,000.

e. Kesimpulan

Nilai F hitung sebesar 73.974 dengan sig. sebesar 0,000 ($p < 0,05$) yang berarti keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian secara serempak variabel independen yaitu jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai alat analisis untuk menunjukkan besarnya kontribusi dari variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan *varians* dari variabel terikatnya. Dari hasil pengujian tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi

sebesar 0.4738 yang berarti kontribusi varian yang diberikan oleh variabel jumlah hotel, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 adalah sebesar 94,55 persen sedangkan sisanya sebesar 5,45 persen dipengaruhi oleh varian lain di luar model penelitian.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Jumlah hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar -3.248 dengan sig. t sebesar 0.001 ($p < 0,05$), sehingga keputusannya menolak H_0 dan menolak H_a . Berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah hotel terhadap pendapatan pajak di Jawa Timur tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah hotel maka pendapatan dari pajak daerah akan mengalami penurunan. Hasil ini tentunya menolak hipotesis yang ada, dimana jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.

Hasil penelitian ini tentunya bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2013), dimana jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang tahun 2011-2014. Jumlah hotel berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah ini menunjukkan jika jumlah hotel yang banyak belum tentu dapat meningkatkan pendapatan hotel yang banyak pula.

4.3.2 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Hasil pengujian membuktikan jika jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar -0.039 dengan signifikansi $0,617 > 0,05$. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut bahwa jumlah wisatawan baik asing ataupun domestik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah dengan arah pengaruh negatif. Arah pengaruh positif mengindikasikan semakin banyak jumlah wisatawan yang datang ke Jawa Timur maka akan berakibat terjadinya peningkatan pendapatan pajak daerah, begitu juga sebaliknya. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji (2013) yang membuktikan jika jumlah wisatawan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri. Hasil ini juga bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustiningtyas (2003) yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

World Tourism Organization (WTO) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pengunjung yaitu setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjungi (Antari, 2013). Antari, (2013) ada dua kategori pengunjung, yaitu

1. Wisatawan yaitu pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama 24 jam di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut.

- a. Pesiir untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olahraga.
 - b. Hubungan dagang, keluarga, konferensi, misi, dan lain sebagainya.
2. Pelancong yaitu pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pengunjung dalam penelitian ini adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada objek dan daya tarik wisata, yang dalam hal ini adalah objek wisata di Jawa Timur sebagai lokasi penelitian baik dalam pengertian wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Baik wisatawan ataupun pelancong yang semakin besar maka akan semakin besar pula potensi daerah untuk menambah pendapatan daerah. Hasil penelitian ini membuktikan jika koefisien yang dihasilkan bernilai positif walaupun tidak signifikan. Koefisien positif ini berarti bahwa semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan maka akan meningkatkan pajak daerah.

4.3.3 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Hasil analisis penelitian membuktikan jika ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan perkapita dengan pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 5,622 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak daerah dengan di Provinsi Jawa Timur. Arah positif ini menunjukkan jika perubahan nilai variabel pendapatan perkapita akan searah dengan perubahan nilai pendapatan pajak daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Digdaya (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Rakiman (2013) serta penelitian yang dilakukan oleh Haniz dan Sasana (2013) yang membuktikan jika pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Pendapatan perkapita menurut Sukirno (2004: 423) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan perkapita sebuah negara atau daerah menurut Ausri (2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

4.3.4 Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Hasil analisis penelitian membuktikan jika tidak ada pengaruh yang signifikan antara PDRB dengan pendapatan pajak daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar -0.197 dengan signifikansi $0,844 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Arah negatif ini menunjukkan jika PDRB di Jawa Timur mengalami peningkatan maka akan menurunkan pendapatan pajak di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2016.

Hasil penelitian ini berlainan dengan penelitian yang dilakukan oleh Digdaya (2015), Arianto (2014) dan Marliyanti dan Arkadimana (2014) bahwa

produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh negatif dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah karena apabila PDRB suatu daerah meningkat belum tentu keinginan untuk membayar pajak juga mengalami peningkatan bahkan ada yang cenderung menggunakan pendapatannya untuk modal usaha dan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Arah negatif mengindikasikan jika ada kenaikan jumlah hotel akan berakibat terjadinya penurunan penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur.
2. Jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Arah positif mengindikasikan jika ada kenaikan jumlah wisatawan akan berakibat terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur.
3. Pendapatan perkapita memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Arah positif menunjukkan jika perubahan nilai variabel pendapatan perkapita akan searah dengan perubahan nilai pendapatan pajak daerah.
4. Pendapatan regional domestik bruto tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Arah negatif ini mengindikasikan perubahan nilai variabel PDRB akan bertentangan dengan perubahan nilai pendapatan pajak daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Setelah dilakukan pengujian statistik dan pembahasan maka ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel yang penyusun gunakan masih terlalu sedikit, padahal masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah seperti retribusi daerah, potensi wilayah, jumlah investasi dan lain sebagainya.
2. Periode penelitian kurang lama di mana data yang ada hanya pada tahun 2012-2016.
3. Tidak semua data di Kabupaten di Jawa Timur memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan sehingga kabupaten yang menjadi sampel hanya sebagian saja.

5.3. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah maka pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur sebaiknya meningkatkan pendapatan masyarakat perkapita terdahulu. Hal ini dikarenakan dengan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat maka dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.
2. Pendapatan regional bruto terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah di provinsi Jawa Timur. Dengan demikian maka pemerintah perlu memberikan stimulus agar potensi ekonomi yang ada di provinsi Jawa Timur dapat dimaksimalkan. Hal ini dikarenakan meningkatkannya

pendapatan domestik regional bruto yang meningkat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah terutama yang berasal dari sektor pajak.

3. Jumlah wisatawan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang negatif, artinya semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan maka dapat mengurangi pajak daerah. Hal ini tentunya bertentangan dengan kondisi normal bahwa semakin banyak jumlah wisatawan seharusnya dapat meningkatkan pajak melalui pajak hotel dan pajak reklame, pajak hiburan dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini ada indikasi jika ada pihak-pihak yang menyembunyikan pendapatannya, sehingga perlu pengawasan yang ketat terhadap para pengelola objek wisata dan perusahaan penunjukan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustiningtyas, Veronika Winarti. 2003. “*Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah (tahun 1998 - 2001)*”. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Aji, Anggit Darmastuti. 2013. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Era Desentralisasi Fiskal”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Aji, Bayu Purnomo dkk. 2015. Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng”, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 3 Tahun 2015)
- Aliandi, Vidya D.A dan Herniwati Retno Handayani. 2013. “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta)” *Diponegoro Journal Of Economics* Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Hal, 1-14
- Anggraini, Yunita dan Puranto Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja; Penyusunan. APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM
- Antari, Ni LS. 2013. “Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar” *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, Agustus 2013, Vol.3 No.1 hal.36
- Arianto, Puspita Suci. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 1 (2014)
- Arifin, Imamul. 2007. *Membukan Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ariyanto, 2005, *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Rineka Cipta

- Badrudin. 2001. "Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pembangunan Industri Pariwisata". *Jurnal Kompak*. No. 3. Hal. 1-13
- Bambang W. dan Aristanti. 2007. *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung: Citra Raya
- BPS Jawa Timur. 2017. Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2017. Diakses dari https://jatim.bps.go.id/4dm!n/pdf_publicasi/Provinsi-Jawa-Timur-Dalam-Angka-2017.pdf.
- Darise, Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum (BLU)*. Jakarta: Indeks
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks.
- Desmiwati. 2010. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh Di Indonesia (Analisis Upah Minimum Propinsi Tahun 2001-2008). *Tesis*. Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia
- Digdaya, Asep Putra (2015) Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013). *Skripsi*. Universitas Stikubank.
- Dimiyati, Adim. 2004. *Mendorong Perekonomian Dengan Pariwisata*. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Volume 1 (Nomor 1). Tahun 2004, hlm. 17-22
- Domaski B. and Gwosdz K. 2010. "Multiplier Effects In Local and Regional Development". *Quaestiones Geographicae* 29 (2), Adam Mickiewicz University Press, Pozna 2010, pp. 27-37.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*/ Yogyakarta: Penerbitan Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2001. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. *Penyunting: Sumarno Zain*, Jakarta: Erlangga
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta : Andi
- Halim, Abdul, Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. *Edisi Tiga*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat

- Haniz, Nadya Fazriana dan Hadi Sasana. 2013. “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota tegal”. *Journal of economics* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-13
- Hidayat, Wahyu. 2011. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisata di Taman Nasional Way Kambas Propinsi Lampung”. *Tesis*. Universitas Indonesia
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marliyanti, Dwi Sundi dan Sudarsana Arka. 2014. “Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar”, *E-Jurnal EP Unud*, 3 [6] : 265-271
- Murib, Pidelis dkk. 2016. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 01 Tahun 2016.
- Nordiawan, Deddi dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Nurrohman, Alfian. 2010. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Peraturan Gubernur (Pergub) No. 8 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Purnastuti, Losina dan Rr.Indah Mustikawati. 2008. *Ekonomi untuk SMA/MA. Kelas XI*. Jakarta: Grasindo.
- Rafsanjani, Fachry Ali. 2015. “Pengaruh Tingkat Inflasi, Pengangguran, dan Pendapatan Per Kapita Regional Terhadap Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Studi Pada Badan Pusat Statistik Dan Dinas

- Pendapatan Daerah Kota Batu Periode Tahun 2004-2013)", *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Vol 6, No 2 (2015)
- Rakiman. 2013. "Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajibpajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo Periode 2002-2010", *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Economi* , Vol 9, No 3 tahun 2013, hal 77-87
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sidik, Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah". *Makalah*. Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dalam Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002
- Sihotang, Yeppy dkk. 2015. "Kaitan Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 – 2013", *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume VII No.1 April 2015
- Sinclair, M. Thea dan Stabler, Mike. 1997. *Economics of Tourism*. London: Rout Ledge
- Sriyana, Jaka. 2014. *Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi Aplikasi Kinerja Bank Syariah di Indonesia)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Tendean, Jesica C dkk. 2014. "Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Manado Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening Variabel", Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5651/5183>. Tanggal 30 oktober 2017
- Trikunawaningsih dan Antyo Pracoyo. 2005. *Aspek dasar ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-undang republik indonesia. Nomor 25 tahun 1999. Tentang. Perimbangan keuangan antara. Pemerintah pusat dan daerah
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonosia
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Wijaya, Ida B.A.B dan I Ketut Sudiana. 2016. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol 5, No. 12 Desember 2016
- Winarno, Wing Wahyu, 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wulandari, Yesi D dkk. 2013. “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang)”, diakses dari <http://eprints.mdp.ac.id/1830/1/JURNAL-2012210021.pdf>
- Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

NO	Kabupaten	Tahun	Jumlah Hotel	LnJW	Jumlah Wisatawan	LnJW	Pendapatan Per Kapita	PDRB	LnPDRB	Pajak Daerah	LnPD
1	Kabupaten Pacitan	2012	23	3,135	654.604	13,392	15.529.700	8.477.600.000.000	29,768	5.954.675.925	22,507
		2013	23	3,135	542.142	13,203	17.186.200	9.416.300.000.000	29,873	7.954.645.820	22,797
		2014	19	2,944	1.089.961	13,902	19.094.100	10.492.200.000.000	29,982	9.053.156.100	22,926
		2015	20	2,996	1.556.950	14,258	21.035.600	11.590.600.000.000	30,081	20.684.068.970	23,753
		2016	20	2,996	1.880.815	14,447	23.115.400	12.767.400.000.000	30,178	21.789.927.220	23,805
2	Kabupaten Bangkalan	2012	5	1,609	2.487.405	14,727	19.436.600	18.037.100.000.000	30,523	15.595.666.540	23,470
		2013	5	1,609	2.473.734	14,721	20.840.900	19.538.400.000.000	30,603	17.089.366.540	23,562
		2014	5	1,609	1.931.875	14,474	22.952.700	21.708.600.000.000	30,709	25.542.933.860	23,964
		2015	4	1,386	1.736.111	14,367	20.118.300	19.198.900.000.000	30,586	27.244.911.416	24,028
		2016	4	1,386	1.600.715	14,286	20.758.000	19.985.800.000.000	30,626	32.294.523.590	24,198
3	Kabupaten Banyuwangi	2012	67	4,205	100.315	11,516	26.743.900	42.108.300.000.000	31,371	40.290.000.000	24,419
		2013	70	4,248	496.541	13,115	29.928.300	47.364.700.000.000	31,489	65.940.000.000	24,912
		2014	72	4,277	546.548	13,211	33.607.000	53.371.200.000.000	31,608	94.130.000.000	25,268
		2015	73	4,290	600.266	13,305	37.751.300	60.179.300.000.000	31,728	115.910.000.000	25,476
		2016	75	4,317	615.633	13,330	41.468.200	66.295.500.000.000	31,825	120.830.000.000	25,518
4	Kabupaten Blitar	2012	8	2,079	157.366	11,966	17.576.500	19.868.500.000.000	30,620	103.670.838.706,46	25,364
		2013	8	2,079	245.144	12,410	19.138.900	21.755.200.000.000	30,711	115.670.863.816,71	25,474
		2014	8	2,079	260.933	12,472	21.161.100	24.140.600.000.000	30,815	188.827.430.090,89	25,964
		2015	10	2,303	1.245.583	14,035	23.377.200	26.776.200.000.000	30,919	139.300.669.878,99	25,660
		2016	10	2,303	1.755.681	14,378	25.516.200	29.311.100.000.000	31,009	224.106.765.168,87	26,135
5	Kabupaten Bojonegoro	2012	12	2,485	52.741	10,873	35.717.700	43.686.400.000.000	31,408	53.172.170.000,00	24,697

		2013	17	2,833	50.980	10,839	39.202.800	48.129.200.000.000	31,505	38.127.664.113,68	24,364
		2014	17	2,833	39.412	10,582	41.004.500	50.533.900.000.000	31,554	68.677.391.510,46	24,953
		2015	20	2,996	53.641	10,890	39.306.500	48.606.500.000.000	31,515	78.758.286.256,24	25,090
		2016	22	3,091	164.371	12,010	44.810.000	55.582.300.000.000	31,649	79.130.307.792,32	25,094
6	Kabupaten Bondowoso	2012	14	2,639	24.336	10,100	14.214.800	10.634.100.000.000	29,995	10.079.064.406,00	23,034
		2013	14	2,639	28.895	10,271	15.665.000	11.792.600.000.000	30,098	11.206.732.325,00	23,140
		2014	14	2,639	57.541	10,960	17.272.300	13.075.100.000.000	30,202	21.279.683.953,00	23,781
		2015	15	2,708	122.671	11,717	19.030.000	14.485.600.000.000	30,304	22.428.418.167,00	23,834
		2016	15	2,708	96.035	11,472	20.727.400	15.858.500.000.000	30,395	24.846.209.005,00	23,936
7	Kabupaten Gresik	2012	15	2,708	3.145.162	14,961	61.854.400	74.946.300.000.000	31,948	252.405.753.597,50	26,254
		2013	15	2,708	3.139.808	14,960	67.763.800	83.153.000.000.000	32,052	287.204.271.547,58	26,383
		2014	16	2,773	3.173.194	14,970	75.545.800	93.797.700.000.000	32,172	386.741.657.665,39	26,681
		2015	16	2,773	3.189.088	14,975	80.174.900	100.723.800.000.000	32,243	450.326.075.139,76	26,833
		2016	19	2,944	3.263.000	14,998	84.899.600	107.882.000.000.000	32,312	412.112.744.765,71	26,745
8	Kabupaten Malang	2012	103	4,635	2.043.609	14,530	21.195.900	52.796.800.000.000	31,597	71.300.000.000	24,990
		2013	105	4,654	2.550.474	14,752	23.388.500	58.674.700.000.000	31,703	95.920.000.000	25,287
		2014	129	4,860	3.251.367	14,995	26.089.500	65.930.900.000.000	31,820	153.920.000.000	25,760
		2015	61	4,111	3.654.482	15,111	29.022.500	73.841.900.000.000	31,933	170.120.000.000	25,860
		2016	143	4,963	5.309.544	15,485	31.940.100	81.843.100.000.000	32,036	191.400.000.000	25,978
9	Kabupaten Ngawi	2012	11	2,398	352.597	12,773	13.002.100	10.695.600.000.000	30,001	14.272.972.888	23,382
		2013	12	2,485	362.098	12,800	14.584.000	12.026.200.000.000	30,118	16.826.150.650	23,546
		2014	13	2,565	248.923	12,425	16.081.000	13.311.800.000.000	30,220	33.899.833.400	24,247
		2015	10	2,303	226.426	12,330	18.091.800	14.994.500.000.000	30,339	38.537.158.480	24,375
		2016	10	2,303	504.047	13,130	19.928.100	16.530.300.000.000	30,436	41.867.576.220	24,458
10	Kabupaten Sumenep	2012	12	2,485	993.408	13,809	19.007.700	20.079.700.000.000	30,631	9.064.183.146	22,928

		2013	12	2,485	851.899	13,655	23.897.500	25.360.000.000.000	30,864	10.564.664.181	23,081
		2014	12	2,485	544.632	13,208	26.528.700	28.311.400.000.000	30,974	14.513.053.554,55	23,398
		2015	13	2,565	627.343	13,349	25.329.600	27.155.900.000.000	30,933	17.033.457.232	23,558
		2016	13	2,565	855.946	13,660	26.902.900	28.969.000.000.000	30,997	17.736.010.382	23,599
11	Kabupaten Tulungagung	2012	22	3,091	195.580	12,184	20.920.400	21.018.700.000.000	30,676	25.544.000.000	23,964
		2013	22	3,091	205.583	12,234	23.038.700	23.255.300.000.000	30,778	29.776.000.000	24,117
		2014	24	3,178	222.228	12,311	25.374.600	25.780.600.000.000	30,881	56.751.000.000	24,762
		2015	24	3,178	218.251	12,293	27.825.400	28.415.300.000.000	30,978	62.341.000.000	24,856
		2016	24	3,178	275.104	12,525	30.335.500	31.123.600.000.000	31,069	67.457.168.815	24,935
12	Kabupaten Tuban	2012	24	3,178	3.878.334	15,171	31.006.700	35.180.200.000.000	31,192	123.760.276.946	25,542
		2013	24	3,178	3.949.648	15,189	34.172.900	39.008.400.000.000	31,295	133.770.276.947	25,619
		2014	24	3,178	4.201.527	15,251	38.284.600	43.801.500.000.000	31,411	143.821.505.016	25,692
		2015	24	3,178	4.772.854	15,378	41.753.600	48.137.700.000.000	31,505	132.086.694.220	25,607
		2016	24	3,178	5.108.680	15,446	45.158.300	52.311.300.000.000	31,588	155.886.224.220	25,772
13	Kota Blitar	2012	16	2,773	662.599	13,404	26.323.700	3.545.800.000.000	28,897	11.156.119.000	23,135
		2013	16	2,773	819.239	13,616	28.957.300	3.929.500.000.000	29,000	12.357.983.000	23,238
		2014	16	2,773	831.858	13,631	31.806.300	4.354.300.000.000	29,102	21.219.660.000	23,778
		2015	15	2,708	890.966	13,700	34.946.500	4.819.100.000.000	29,204	24.054.196.000	23,904
		2016	15	2,708	1.035.657	13,851	38.334.200	5.333.600.000.000	29,305	26.001.647.000	23,981
14	Kota Malang	2012	65	4,174	189.035	12,150	46.431.400	38.747.000.000.000	31,288	159.124.119.793	25,793
		2013	78	4,357	200.622	12,209	50.927.500	42.819.900.000.000	31,388	238.449.748.160	26,197
		2014	78	4,357	2.429.101	14,703	55.039.300	46.563.200.000.000	31,472	278.885.189.550	26,354
		2015	104	4,644	3.385.476	15,035	60.876.800	51.824.400.000.000	31,579	316.682.891.170	26,481
		2016	100	4,605	3.996.609	15,201	66.758.100	57.173.000.000.000	31,677	374.641.673.420	26,649

15	Kota Mojokerto	2012	8	2,079	48.541	10,790	29.884.600	3.663.900.000.000	28,930	13.360.000.000	23,316
		2013	9	2,197	52.958	10,877	32.602.100	4.036.100.000.000	29,026	23.417.626.748	23,877
		2014	9	2,197	41.576	10,635	35.502.000	4.427.100.000.000	29,119	25.092.877.550	23,946
		2015	10	2,303	38.947	10,570	38.835.200	4.881.600.000.000	29,216	27.948.164.766	24,054
		2016	10	2,303	31.904	10,370	42.492.300	5.374.300.000.000	29,313	35.333.990.000	24,288
16	Kota Pasuruan	2012	4	1,386	20.439	9,925	23.103.600	4.394.300.000.000	29,111	13.643.037.037	23,336
		2013	5	1,609	38.904	10,569	25.133.600	4.833.200.000.000	29,207	20.543.481.000	23,746
		2014	6	1,792	54.419	10,904	27.656.900	5.346.100.000.000	29,307	21.748.647.000	23,803
		2015	6	1,792	70.820	11,168	30.541.200	5.949.400.000.000	29,414	28.223.794.000	24,063
		2016	6	1,792	335.002	12,722	33.435.300	6.560.000.000.000	29,512	23.505.307.333	23,880
17	Kota Surabaya	2012	152	5,024	9.884.918	16,107	104.494.700	293.180.800.000.000	33,312	1.852.977.637.000	28,248
		2013	104	4,644	11.472.211	16,255	116.163.600	327.802.000.000.000	33,423	2.154.652.323.798.000	35,306
		2014	125	4,828	16.671.829	16,629	128.921.600	365.350.900.000.000	33,532	2.427.648.093.000.000	35,426
		2015	145	4,977	18.873.419	16,753	142.604.600	406.223.500.000.000	33,638	2.738.899.424.558.360	35,546
		2016	175	5,165	20.438.755	16,833	157.730.200	451.535.900.000.000	33,744	3.000.152.510.888.000	35,637

Lampiran 2 Statistik Deskriptif

Deskriptif	Pajak Daerah	Jumlah Hotel	Jumlah Wisatawan	Pendapatan Perkapita	PDRB
Minimum	5.954.675.925	4	20.439	13.002.100	3.545.800.000.000
Maximum	3.000.152.510.888.000	175	20.438.755	157.730.200	451.535.900.000.000
Mean	121.533.144.307.224	34,611	2.076.466	37.598.692	51.135.221.176.471
Std. Dev	554.022.262.268.407	40,825	3.783.095	28.023.782	84.672.651.210.800

Lampiran 3 Estimasi Data Panel

A. Hasil Uji Estimasi *Common Effect*

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/11/18 Time: 09:58

Sample: 2012 2016

Included observations: 5

Cross-sections included: 17

Total pool (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNJH?	0.015431	0.137187	0.112483	0.9107
LNJW?	0.029967	0.079268	0.378049	0.7064
PPK?	6.18E-08	4.77E-09	12.97472	0.0000
LNPDRB?	0.724980	0.032584	22.24965	0.0000
R-squared	0.859141	Mean dependent var		25.14486
Adjusted R-squared	0.853924	S.D. dependent var		2.587898
S.E. of regression	0.989091	Akaike info criterion		2.861855
Sum squared resid	79.24243	Schwarz criterion		2.976804
Log likelihood	-117.6289	Hannan-Quinn criter.		2.908091
Durbin-Watson stat	0.713437			

B. Hasil Uji Estimasi Fixed Effect

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/11/18 Time: 09:58

Sample: 2012 2016

Included observations: 5

Cross-sections included: 17

Total pool (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.32375	25.60874	1.223166	0.2258
LNJH?	-1.890351	0.581852	-3.248852	0.0018
LNJW?	0.075056	0.149675	0.501460	0.6178
PPK?	1.01E-07	1.79E-08	5.622649	0.0000
LNPDRB?	-0.170695	0.865960	-0.197116	0.8444
Fixed Effects (Cross)				
_KAB_PACITAN--C	-0.269790			
_KAB_BANGKALAN--C	-2.565142			
_KAB_BANYUWANGI--C	2.878101			
_KAB_BLITAR--C	0.627200			
_KAB_BOJONEGORO--C	-0.573755			
_KAB_BONDOWOSO--C	-0.150504			
_KAB_GRESIK--C	-2.574010			
_KAB_MALANG--C	4.689016			
_KAB_NGAWI--C	-0.202941			
_KAB_SUMENEP--C	-1.446275			
_KAB_TULUNGAGUNG--C	0.925748			
_KAB_TUBAN--C	0.711509			
_KOTA_BLITAR--C	-1.807532			
_KOTA_MALANG--C	2.039065			
_KOTA_MOJOKERTO--C	-2.675904			
_KOTA_PASURUAN--C	-3.034495			
_KOTA_SURABAYA--C	3.429710			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.958536	Mean dependent var	25.14486
Adjusted R-squared	0.945578	S.D. dependent var	2.587898
S.E. of regression	0.603717	Akaike info criterion	2.038928
Sum squared resid	23.32636	Schwarz criterion	2.642406
Log likelihood	-65.65443	Hannan-Quinn criter.	2.281664
F-statistic	73.97499	Durbin-Watson stat	2.154318
Prob(F-statistic)	0.000000		

C. Hasil Uji Estimasi Random Effect

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 02/11/18 Time: 09:59

Sample: 2012 2016

Included observations: 5

Cross-sections included: 17

Total pool (balanced) observations: 85

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.997295	8.439669	0.355144	0.7234
LNJH?	-0.286970	0.271294	-1.057782	0.2933
LNJW?	-0.011755	0.107248	-0.109609	0.9130
PPK?	7.27E-08	9.19E-09	7.913582	0.0000
LNPDRB?	0.662173	0.300078	2.206672	0.0302
Random Effects (Cross)				
_KAB_PACITAN--C	-0.044615			
_KAB_BANGKALAN--C	-0.299113			
_KAB_BANYUWANGI--C	0.096267			
_KAB_BLITAR--C	1.403655			
_KAB_BOJONEGORO--C	-0.906136			
_KAB_BONDOWOSO--C	0.164438			
_KAB_GRESIK--C	-1.924089			
_KAB_MALANG--C	1.005218			
_KAB_NGAWI--C	0.587298			
_KAB_SUMENEP--C	-0.928797			
_KAB_TULUNGAGUNG--C	0.252288			
_KAB_TUBAN--C	0.165791			
_KOTA_BLITAR--C	-0.039381			
_KOTA_MALANG--C	-0.169330			
_KOTA_MOJOKERTO--C	-0.209745			
_KOTA_PASURUAN--C	-0.057470			
_KOTA_SURABAYA--C	0.903722			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.862786	0.6713
Idiosyncratic random		0.603717	0.3287

Weighted Statistics			
R-squared	0.671347	Mean dependent var	7.509460
Adjusted R-squared	0.654915	S.D. dependent var	1.072668
S.E. of regression	0.630128	Sum squared resid	31.76486
F-statistic	40.85451	Durbin-Watson stat	1.696620
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.847665	Mean dependent var	25.14486
Sum squared resid	85.69835	Durbin-Watson stat	0.628867

Lampiran 4 Uji Kesesuaian Model

A. Hasil Uji Chow dan LM Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.313275	(16,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	102.209718	16	0.0000

B. Hasil Uji Hausman

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.152491	4	0.0249